

Analisis Literasi Politik Jelang Pemilu 2024 di Kota Pariaman

Bella Irwani¹, Hana Alifia Hadi², Eka Vidya Putra^{3*}

^{1,2,3}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: ekavidyaputra@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan dapat mengetahui atau mengidentifikasi seberapa tingkat literasi politik masyarakat jelang pemilu 2024 di Kota Pariaman. Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa paham masyarakat mengetahui pengetahuan tentang politik, pengetahuan tentang ke-pemilu-an dan pengetahuan tentang penyelenggara pemilu 2024 sehingga dapat mengetahuinya seberapa paham masyarakat tentang pemilu. Pendekatan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini, yaitu: 1. Masyarakat akan berpartisipasi dalam pemilu 2024; 2. Masyarakat masih tidak percaya bahwa pemilu di Indonesia sudah dilakukan tanpa politik uang; 3. hanya sebagian masyarakat yang sudah menentukan pilihannya dalam pemilu 2024. Pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 2024 yang dimana masyarakat berkesempatan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR,DPD,DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, masih banyak masyarakat Kota Pariaman yang tidak mengetahui lebih jelas apa saja yang akan dipilih untuk pemilu 2024. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa pentingnya literasi politik dan juga bisa membentuk sebuah program yang dapat meningkatkan literasi politik masyarakat di Kota Pariaman.

Kata Kunci: Pariaman; Pemilu; Politik.

Abstract

This research aims to find out or identify the level of political literacy in the community ahead of the 2024 election in Pariaman City. The importance of this research is to find out how much the public understands political knowledge, knowledge about elections and knowledge about the 2024 election organizers so that they can find out how much the public understands about elections. Qualitative descriptive research design approach. The results of this research are: 1. The public will participate in the 2024 elections; 2. People still do not believe that elections in Indonesia are held without money politics; 3. Only a portion of the public has made their choice in the 2024 election. The 2024 election will be held on 2024, where the public will have the opportunity to elect the President, Vice President, Members of the DPR, DPD, DPRD, Province and Regency/City DPRD. From the results of the research that has been carried out, there are still many people in Kota Pariaman who do not know more clearly who will be selected for the 2024 election. It is hoped that the results of this research can increase awareness of the importance of political literacy and can also form a program that can increase the political literacy of the community in Pariaman City.

Keywords: Election; Pariaman; Politic.

How to Cite: Irwani, B., Hadi, H.A. & Putra, E.V. (2024). Analisis Literasi Politik Jelang Pemilu 2024 di Kota Pariaman. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 1 (1), 37-56.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

Pendahuluan

Pada tahun 2024 Indonesia akan kembali melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1995 dan sudah diselenggarakan sebanyak 12 kali, Pemilihan Umum sudah diatur dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk memilih presiden dan wakil presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 telah menetapkan jadwal pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2024 (Pemilu Serentak). Sebelum dilaksanakannya pemilu 2024 sudah seharusnya masyarakat mengetahui bagaimana memilih calon pemimpin secara bijak, sehingga dibutuhkan pemahaman atau literasi politik masyarakat dalam memilih.

Menurut Denver dan Hands (1990) dalam Karim et al (2015), Literasi Politik (political literacy) merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik dan isu-isu politik, suatu pengetahuan dan pemahaman yang memungkinkan setiap warga negara dapat secara efektif melaksanakan perannya (berperan serta, partisipasi) sebagai warga negara. Menurut Jenni S Bev yang dikutip dari buku (Heryanto et al, 2019) menyebutkan literasi politik mengacu pada seperangkat keterampilan yang diperlukan warga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan masyarakat. Literasi politik juga merupakan upaya mengimpretasikan pengetahuan atau wawasan mengenai politik dan isu-isu politik di kehidupan sehari-hari agar masyarakat memiliki pengetahuan mengenai politik, partisipasi politik dan hal-hal mengenai politik sehingga masyarakat bisa memilih keadaan politik sesuai dengan pemahamannya. Bernard Crick (Putri, 2017) mengemukakan bahwa literasi politik merupakan mengimplementasikan senyawa pengetahuan, keterampilan, dan sikap mengenai politik dari hal-hal kecil seperti isu-isu politik serta mempengaruhi diri sendiri dan orang lain dalam pengambilan keputusannya. Dengan adanya literasi politik ini, maka para pemilih pemula bisa berpartisipasi dalam kegiatan politik yang berhubungan dengan beberapa aspek seperti konsep negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, dan kebijakan umum.

Berbasis pemahaman di atas, literasi politik dengan demikian meniscayakan adanya elemen-elemen yang dapat diidentifikasi dan juga diukur. Dalam kaitan ini, (Mudhok, 2005) yang dikutip dari (Karim, 2015) menawarkan adanya empat elemen literasi politik, yaitu; (1) kehirauan dan kesadaran pentingnya aktivitas dan institusi politik kewenangan dan perannya. (2) kemampuan untuk membuat opini dan otonomi

posisi di dalam proses politik dalam rangka menghasilkan suatu outcome politik. (3) pengetahuan mengenai kebijakan, perencanaan, dan anggaran pemerintahan untuk pembangunan dan pelayanan publik. (4) partisipasi dalam kegiatan politik. Literasi pemilu dapat didefinisikan sebagai pemahaman masyarakat tentang proses pemilu dan pengetahuan mereka terhadap hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih. Literasi pemilu yang tinggi menjadi faktor penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi, partisipatif, dan kritis dalam memberikan suara mereka pada Pemilu. Berdasarkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Tepat pada 14 Februari 2024 mendatang Indonesia serentak akan melakukan pemilu.

Literasi Politik terkait pemahaman dalam memahami informasi kondisi calon-calon pemimpin yang akan memimpin negara lima (5) tahun kedepan. Terdapat 69% penduduk Indonesia masuk dalam kategori Usia Produktif yang mana jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif (Viva Budy Kusnandar, n.d.). Hal ini turut mempengaruhi keberlanjutan kesejahteraan bangsa sehingga Indonesia harus mampu menciptakan generasi muda berkualitas agar dapat. Dalam konteks penelitian di Kota Pariaman, tujuan literasi politik dapat mencakup beberapa aspek yang relevan dengan dinamika politik dan kebijakan di kota tersebut. Beberapa tujuan mungkin termasuk: (1) Mengetahui seberapa jauh pengetahuan warga Kota Pariaman tentang pengetahuan politik. (2) Mengetahui bentuk media apa yang digunakan masyarakat Pariaman dalam mencari informasi tentang politik dan pemilu. (3) Memberikan informasi kepada masyarakat pariaman mengenai apa saja yang akan dipilih untuk pemilu 2024. (4) Mengetahui tingkat kepedulian masyarakat kota Pariaman mengenai pelaksanaan pemilu 2024

Dengan merinci tujuan-tujuan tersebut, penelitian literasi politik di Kota Pariaman dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kesiapan politik masyarakat setempat dan memberikan dasar untuk upaya peningkatan partisipasi dan pemahaman politik. Dengan demikian masyarakat perlu memiliki literasi politik berupa pengetahuan dan kesadaran akan dampak dari penyebaran informasi yang luas dengan dapat memilah antara isu-isu politik yang benar dan tidak, tujuannya agar demokrasi berjalan dengan baik. Dalam artikel ini, akan dibahas mengenai literasi masyarakat terhadap pemilu 2024 di kota Pariaman dan bagaimana literasi pemilu dapat ditingkatkan.

Kemampuan yang paripurna sekaligus keterampilan multidimensi dalam perspektif literasi politik bagi warga negara muda adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa ditawar. Literasi politik bukan hanya sekedar paham tentang mekanisme pemilihan dalam struktur kekuasaan dan pemerintahan saja, namun juga harus mampu menyadari dampak apa yang akan diperoleh pada saat menjatuhkan pilihan dalam setiap pesta demokrasi langsung. Kemampuan paripurna inilah yang dibutuhkan untuk menganalisis beragam jejak rekam para calon kandidat dan kemampuan untuk menakar potensi realisasi serta manfaat dan mudharat setiap program kerja yang ditawarkan atau dijanjikan calon merupakan hal mendasar bagi pemilih sebelum menjatuhkan pilihannya. Bahkan jika harus merujuk pada urgensi status warga negara yang terdidik sebagai mahasiswa pada tingkat idealnya harus mampu memahami realita dan konteks politik yang terjadi baik di tingkat lokal maupun nasional..

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Setiawan, 2018). Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah, penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba mencandra suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kelamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan (Abdussamad, 2021).

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan

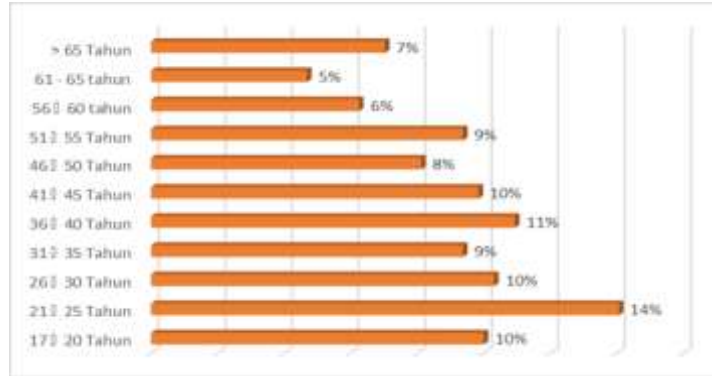
ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. Penelitian diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan survei literasi politik jelang pemilihan umum 2024 dalam kaitannya dengan penerapan survei literasi politik jelang pemilu 2024 terhadap masyarakat sekitar di daerah Kota Pariaman Kecamatan Pariaman Tengah, Pariaman Utara, Pariaman Timur, Pariaman Selatan. Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrumen atau objek penelitian..

Hasil dan Pembahasan

Kota Pariaman secara geografis terletak di pantai barat pulau Sumatera Barat dan berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia. Kota Pariaman terletak antara $00^{\circ} 33' 00''$ – $00^{\circ} 40' 43''$ Lintang Selatan dan $100^{\circ} 04' 46''$ – $100^{\circ} 10' 55''$ Bujur Timur. Tercatat memiliki luas wilayah 73,36 km², dengan panjang garis pantai 12,00 km. Luas daratan kota ini setara dengan 0,17% dari luas daratan wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan 6 buah pulau-pulau kecil (Pariaman, n.d.). Berdasarkan data tercatat jumlah penduduk Kota Pariaman sebanyak 95.294 jiwa. Kemudian Kota Pariaman terbagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Pariaman Selatan dengan jumlah penduduk 20.318 jiwa, Pariaman Tengah 32.105 jiwa, Pariaman Timur 20.063 jiwa dan Pariaman Utara 22.808 jiwa (Badan Pusat Statistik Kota Pariaman, n.d.).

Setelah melakukan survey pada periode 25-26 November 2023 di Kota Pariaman dengan pembagian 4 kecamatan yang dilakukan pada 640 responden, terdapat 321 berjenis kelamin laki-laki dan 319 berjenis kelamin perempuan. Fokus dari penelitian ini melihat bagaimana usia seseorang mempengaruhi literasi politik jelang pemilu 2024 di Kota Pariaman. Pada gambar 1.1 Data menunjukkan populasi terbesar berdasarkan rentang usia di Kota Pariaman diduduki pada rentang usia 21- 24 tahun dengan jumlah 14%, kemudian dilanjut dengan 36-40 tahun 11%, 41-45 tahun 10%, 26-30 tahun 10%, 17-20 tahun 10%, 51-55 tahun 9%, 31-35 tahun 9%, 46-50 tahun 8%, >65 tahun 7%, 56-60 tahun 6%, dan 61-65 tahun 5%. Pada kuesioner yang diberikan terdapat beberapa

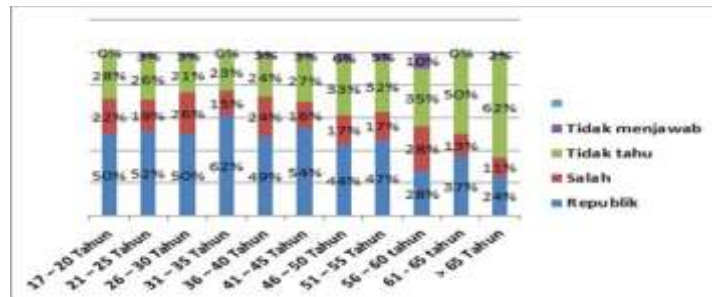
pertanyaan terkait pengetahuan tentang politik, pengetahuan tentang pemilihan dan pengetahuan tentang penyelenggaraan pemilu 2024.



Gambar 1. Rentang Usia

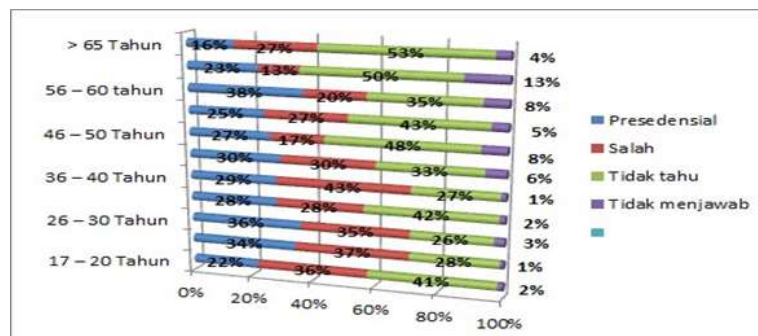
Pengetahuan tentang politik

Rata-rata masyarakat yang menjawab republik diduduki pada rentang usia 31-35 tahun dengan jumlah persentase 62%, sebaliknya terdapat 28% masyarakat salah menjawab di rentang usia 56-60 tahun.



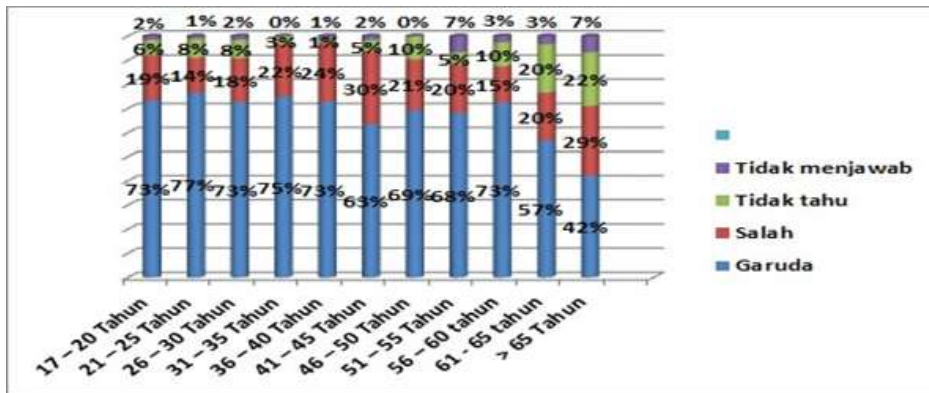
Gambar 2. Bentuk Negara Indonesia

Dilanjuti dengan pertanyaan bentuk pemerintahan, rata-rata menjawab benar diduduki oleh masyarakat rentang usia 56-60 tahun 38%, sebaliknya masyarakat salah menjawab pertanyaan di rentang usia >65 tahun dengan persentase 16%.



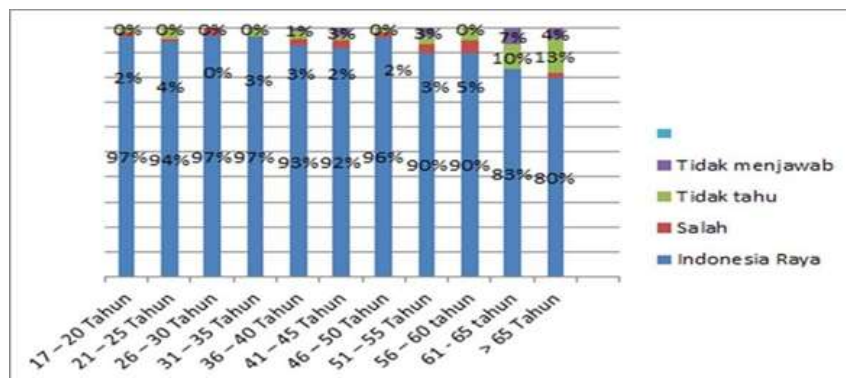
Gambar 3. Sistem pemerintahan Indonesia

Pada pertanyaan selanjutnya, yaitu lambang negara Indonesia lebih diketahui oleh masyarakat dengan rentang usia 31-35 tahun 75%, sebaliknya rentang usia >65 tahun salah menjawab pertanyaan tersebut dengan persentase 42%.



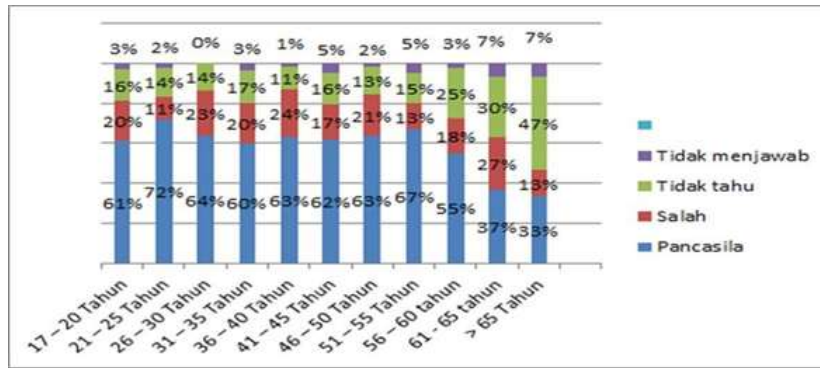
Gambar 4. Lambang negara Indonesia

Dilanjuti dengan pertanyaan lagu kebangsaan Indonesia hampir seluruh masyarakat menjawab benar, yaitu Indonesia Raya.



Gambar 5. Lagu kebangsaan Indonesia

Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu dasar dari negara Indonesia masih banyak masyarakat yang tidak tahu dalam menjawabnya. Hanya 72% jumlah tertinggi yang mampu menjawab benar dari rentang usia 21-25 tahun. Sebaliknya terdapat 27% masyarakat salah dalam menjawab pertanyaan dari rentang usia 61-65 tahun.



Gambar 5. Lagu kebangsaan Indonesia

Kemudian dilanjut dengan pertanyaan percaya, ragu, tidak percaya Indonesia telah mampu mewujudkan hukum yang tidak memihak, pemerataan pembangunan, pemberantasan kemiskinan, keadilan sosial, pendidikan yang murah, pelayanan kesehatan. Berdasarkan tabel dibawah pada pertanyaan pertama masyarakat masih ragu bahwa Indonesia telah mampu mewujudkan hukum yang tidak memihak dengan jumlah persentase 33,5%. Dilanjuti dengan pertanyaan Indonesia telah mampu mewujudkan pemerataan pembangunan, rata-rata masyarakat menjawab percaya Indonesia telah mampu mewujudkan hal tersebut dengan jumlah persentase 37,5%. Pertanyaan selanjutnya Indonesia telah mampu mewujudkan Pemberantasan kemiskinan, rata-rata masyarakat menjawab ragu karena jumlah persentase paling tinggi mencapai 37,03%. Kemudian pertanyaan selanjutnya Indonesia telah mampu mewujudkan keadilan sosial, rata-rata masyarakat menjawab ragu dengan jumlah persentase tertinggi 36,25%. Untuk pertanyaan Indonesia telah mampu mewujudkan pendidikan yang murah, rata-rata masyarakat menjawab percaya dengan persentase terbesarnya 55,16% dan pertanyaan terakhir Indonesia telah mampu mewujudkan pelayanan kesehatan rata-rata masyarakat menjawab percaya dengan jumlah persentase 58,59%.

Pertanyaan	Percaya	Ragu	Tidak Percaya	Tidak tahu	Tidak menjawab
Indonesia mampu mewujudkan Hukum Tidak Memihak	31.88%	33.59%	27.50%	6.09%	0.94%
Indonesia mampu mewujudkan Pemerataan Pembangunan	37.50%	31.09%	22.97%	6.88%	1.09%
Indonesia mampu mewujudkan Pemberantasan kemiskin	25.31%	37.03%	31.72%	4.84%	0.78%
Indonesia mampu mewujudkan Keadilan social	30.63%	36.25%	25.94%	5.94%	1.09%
Indonesia mampu mewujudkan Pendidikan yang murah	55.16%	23.44%	14.69%	5.94%	0.78%
Indonesia mampu mewujudkan Pelayanan kesehatan	58.59%	24.84%	10.16%	5.47%	0.63%

Gambar 7. Percaya, ragu, tidak percaya Indonesia telah mampu mewujudkan

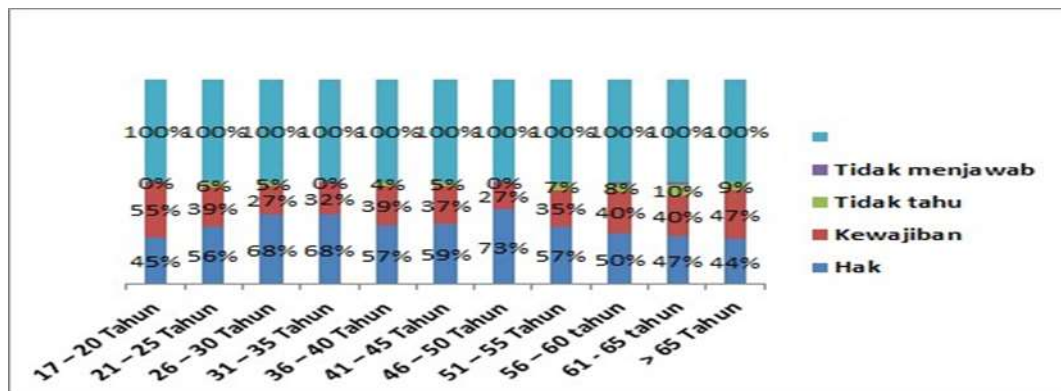
Pada pertanyaan kuesioner selanjutnya terkait pandangan masyarakat tentang sistem pemerintahan demokrasi, rata-rata jawaban tertinggi diduduki pada rentang usia 41-45 tahun persentase 45,31% dengan jawaban demokrasi belum terlaksana dengan baik, selanjutnya pertanyaan demokrasi adalah pilihan terbaik diduduki oleh rentang usia 17-20 tahun dengan persentase 34,92% dan pertanyaan terakhir dengan pernyataan Terserah sistem pemerintahan apa yang dianut, yang penting dapat hidup sejahtera dan bahagia diduduki pada rentang usia 51-55 tahun dengan persentase 38,98%.

Column1	Demokrasi adalah pilihan terbaik	Demokrasi belum terlaksana dengan baik	Terserah sistem pemerintahan apa yang dianut, yang penting dapat hidup sejahtera dan bahagia	Tidak tahu	Tidak menjawab
17 – 20 Tahun	34,92%	39,68%	20,63%	3,17%	1,59%
21 – 25 Tahun	22,47%	42,70%	29,21%	3,37%	2,25%
26 – 30 Tahun	23,81%	44,44%	23,81%	6,35%	1,59%
31 – 35 Tahun	21,67%	40,00%	31,67%	6,67%	0,00%
36 – 40 Tahun	20,55%	38,36%	30,14%	8,22%	2,74%
41 – 45 Tahun	21,88%	45,31%	25,00%	6,25%	1,56%
46 – 50 Tahun	28,30%	33,96%	33,96%	1,89%	1,89%
51 – 55 Tahun	15,25%	42,37%	38,98%	1,69%	1,69%
56 – 60 tahun	27,50%	35,00%	27,50%	7,50%	2,50%
61 – 65 tahun	29,63%	18,52%	33,33%	18,52%	0,00%
> 65 Tahun	22,73%	15,91%	38,64%	13,64%	9,09%

Gambar 8. Sistem pemerintahan demokrasi

Pengetahuan tentang kepemiluan

Rata-rata masyarakat yang menjawab benar yaitu hak diduduki pada rentang usia 46-50 tahun dengan jumlah persentase 73%, sebaliknya terdapat 55% yang menjawab salah yaitu kewajiban diduduki pada rentang usia 17-20 tahun.



Gambar 9. Pemilu hak atau kewajiban

Dilanjuti dengan pertanyaan apakah bapak/ibu/saudara percaya, ragu atau tidak percaya pemilu akan mampu menghasilkan kesejahteraan masyarakat, wujud dari keinginan masyarakat, pergantian kepemimpinan secara damai, keberlanjutan

pembangunan dan kepemimpinan yang amanah dan melayani. Berdasarkan tabel dibawah pertanyaan pertama masyarakat masih ragu bahwasannya pemilu akan mampu menghasilkan kesejahteraan masyarakat dengan jumlah persentase 41%.

Pertanyaan kedua masyarakat masih banyak yang ragu dengan jumlah persentase bahwasannya pemilu akan mampu menghasilkan wujud dari keinginan rakyat. Selanjutnya pertanyaan ketiga masyarakat sudah percaya bahwa pemilu akan mampu menghasilkan pergantian kepemimpinan secara damai dengan jumlah persentase 44%. Kemudian pertanyaan selanjutnya masyarakat juga percaya bahwa pemilu akan mampu menghasilkan keberlanjutan pembangunan dengan jumlah persentase 44%. Untuk pertanyaan berikutnya, masyarakat masih ragu bahwa pemilu akan mampu menghasilkan kepemimpinan yang amanah dan melayani dengan jumlah persentase 40%.

Pertanyaan	Percaya	Ragu	Tidak Percaya	Tidak tahu	Tidak menjawab
Pemilu menghasilkan Kesejahteraan rakyat	35%	41%	18%	5%	1%
Pemilu menghasilkan Wujud dan keinginan rakyat	35%	38%	21%	5%	1%
Pemilu menghasilkan Pergantian kepemimpinan secara damai	44%	33%	16%	6%	1%
Pemilu menghasilkan Keberlanjutan pembangunan	44%	33%	16%	6%	1%
Pemilu menghasilkan Kepemimpinan yang amanah dan melayani	34%	40%	18%	6%	2%

Gambar 10. Pemilu akan mampu menghasilkan beberapa poin

Pertanyaan selanjutnya, apakah bapak/ibu/saudara percaya, ragu atau tidak percaya bahwa pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan tanpa politik uang, kampanye hitam, manipulasi perolehan suara, kecurangan di TPS, hoax, keberpihakan PNS dan kecurangan dari penyelenggara. Berdasarkan tabel dibawah ini, pertanyaan pertama masyarakat tidak percaya bahwa pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan tanpa politik uang dengan jumlah persentase 50%. Pada pertanyaan kedua masyarakat tidak percaya bahwa pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan tanpa kampanye hitam dengan jumlah persentase 40%. Selanjutnya pertanyaan ketiga masyarakat masih ragu bahwa pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan tanpa manipulasi perolehan suara dengan jumlah persentase 34%. Pada pertanyaan keempat masyarakat masih ragu bahwa pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan tanpa kecurangan di TPS dengan jumlah persentase 34%. Selanjutnya pertanyaan kelima masyarakat juga masih ragu bahwa pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan tanpa hoax dengan jumlah persentase 31%. Kemudian pada pertanyaan keenam masyarakat masih ragu bahwa pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan tanpa keberpihakan PNS dengan jumlah persentase 31%. Pertanyaan

selanjutnya masyarakat masih ragu dan tidak percaya bahwa pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan tanpa kecurangan dari penyelenggara dengan jumlah persentase yang sama yaitu 30%.

Pertanyaan	Column1	Column2	Percaya	Ragu	Tidak Percaya	Tidak tahu	Tidak menjawab
Pemilu Tanpa politik uang			16%	28%	50%	6%	1%
Pemilu Tanpa kampanye hitam			20%	25%	40%	14%	2%
Pemilu Tanpa manipulasi perolehan			22%	34%	31%	11%	1%
Pemilu Tanpa kecurangan di TPS			27%	34%	31%	10%	2%
Pemilu Tanpa hoax			24%	31%	29%	13%	3%
Pemilu Berpihak			25%	31%	25%	15%	3%
Pemilu dengan kecurangan			24%	30%	30%	13%	2%

Gambar 11. Pemilu sudah dilaksanakan tanpa beberapa poin

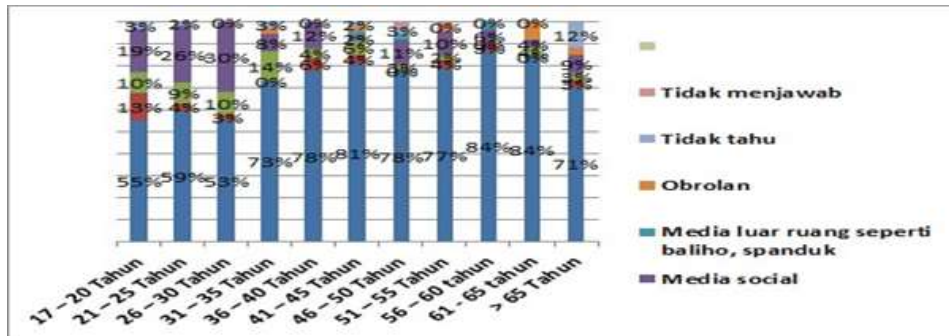
Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan apakah bapak/ibu/saudara mengikuti, kadang-kadang atau tidak pernah mengikuti pemberitaan tentang informasi kepemiluan, partai politik, calon presiden dan wakil presiden, korupsi dan demonstrasi. Berdasarkan tabel dibawah, pada pertanyaan pertama masyarakat kadang-kadang mengikuti pemberitaan tentang kepemiluan dengan persentase

42%. Selanjutnya pertanyaan kedua masyarakat banyak yang tidak mengikuti pemberitaan tentang partai politik dengan jumlah 39%. Pertanyaan ketiga masyarakat banyak yang mengikuti pemberitaan tentang calon presiden dan wakil presiden dengan jumlah 40%. Pada pertanyaan keempat masyarakat kadang-kadang mengikuti pemberitaan tentang korupsi dengan jumlah 34%. Pertanyaan berikutnya masyarakat banyak yang tidak mengikuti pemberitaan tentang demonstrasi dengan jumlah 44%.

Pertany	Column	Column	Column	Column	Mengikuti	Kadang kadang	Tidak mengikuti	Tidak tahu	Tidak menjawab
Mengikuti tentang Kepemiluan					28%	42%	25%	4%	1%
Mengikuti tentang Partai politik					18%	38%	39%	5%	1%
Mengikuti tentang Calon presiden dan wakil					40%	33%	39%	5%	1%
Mengikuti tentang Korupsi					22%	34%	22%	4%	2%
Mengikuti tentang Demonstrasi					19%	28%	44%	6%	3%

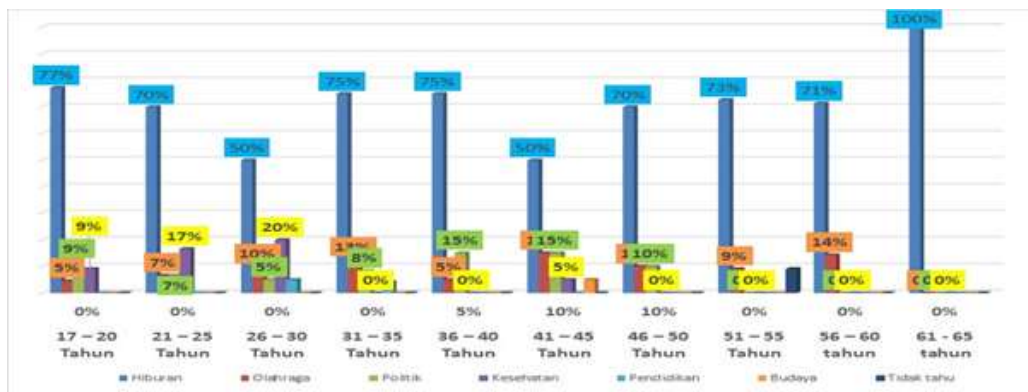
Gambar 12. Pemberitaan tentang kepemiluan

Selanjutnya dengan pertanyaan media apa yang biasanya bapak/ibu/saudara gunakan untuk mencari informasi. Berdasarkan tabel dibawah media yang banyak digunakan masyarakat mencari informasi adalah media luar ruang seperti baliho/spanduk dengan jumlah 84% diduduki pada rentang usia 56-65 tahun.



Gambar 13. Media sebagai sumber informasi

Dilanjuti dengan pertanyaan jenis informasi/konten media sosial seperti apa yang bapak/ibu/saudara sukai. Berdasarkan gambar dibawah masyarakat banyak menyukai konten hiburan dengan persentase 100% yang diduduki pada rentang usia 61-65 tahun.



Gambar 14. Konten media sosial yang sering disukai

Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang seberapa sering Bapak/Ibu/Saudara menggunakan media sosial setiap hari, seperti penggunaan media sosial berupa FB, Instagram, Youtube, twitter dan Tiktok. Berdasarkan tabel dibawah, pada pertanyaan pertama rata-rata masyarakat menggunakan FB kurang dari satu jam dalam sehari dengan frekuensi yaitu sebesar 30%. Pertanyaan yang ke dua yaitu lama menggunakan instagram dalam sehari, rata-rata masyarakat menggunakan Instagram kurang dari satu jam dalam sehari dengan frekuensi yaitu sebesar 22%. Pertanyaan ke tiga yaitu lama menggunakan youtube, rata-rata masyarakat menggunakan youtube kurang dari satu jam dalam sehari yaitu dengan frekuensi sebesar 28%. Pertanyaan ke empat yaitu lama menggunakan Twitter, rata-rata masyarakat menggunakan Twitter kurang dari satu jam dalam sehari yaitu dengan frekuensi sebesar 20%. Pada pertanyaan ke lima yaitu lama menggunakan Tiktok, rata-rata masyarakat menggunakan aplikasi tiktok dalam sehari yaitu kurang dari satu jam dengan frekuensi sebesar 19%.

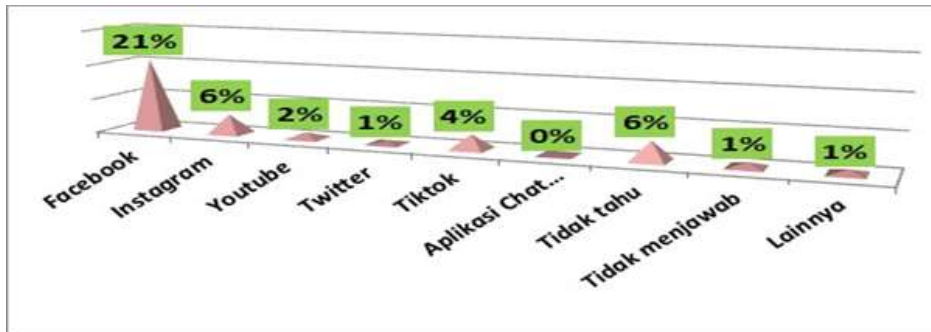
Pertanyaan	< 1 jam	< 2 jam	< 3 jam	< 4 jam	< 5 jam	> 5 jam
Lama menggunakan FB per Hari	30%	11%	7%	3%	2%	2%
Lama menggunakan instagram per hari	22%	10%	7%	3%	2%	4%
Lama menggunakan Youtube per hari	28%	10%	7%	2%	2%	2%
Lama menggunakan Twiter per hari	20%	3%	1%	1%	1%	0%
Lama menggunakan Tiktok per hari	19%	9%	9%	3%	3%	6%

Gambar 15. Penggunaan media sosial setiap hari

Pertanyaan selanjutnya yaitu melalui media sosial, pernahkah Bapak/Ibu/saudara mendapatkan informasi atau konten dari presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif, KPU, BAWASLU dan lembaga pemerintahan lainnya. Berdasarkan tabel dibawah dapat dilihat bahwa sebanyak 57% masyarakat pernah mendapatkan informasi atau konten tentang Capres dan Cawapres. kemudian sebanyak 32% masyarakat pernah mendapatkan konten atau informasi tentang Calon Anggota Legislatif, yang mendapatkan lebih sedikit dibandingkan masyarakat yang tidak pernah mendapatkan konten tentang calon anggota legislatif yaitu dengan frekuensi sebesar 37%. kemudian sebanyak 41% masyarakat tidak pernah mendapatkan konten tentang KPU, sedangkan yang pernah mendapatkan konten tentang KPU hanya sebesar 27%. Selanjutnya masyarakat yang mendapatkan konten tentang BAWASLU hanya 23% saja lebih sedikit dibandingkan dengan masyarakat yang tidak pernah mendapatkan konten dari BAWASLU yaitu dengan frekuensi sebesar

44%. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu masyarakat yang mendapatkan konten dari pemerintahan lainnya sebanyak 25% lebih sedikit juga dibandingkan yang tidak pernah mendapatkan konten dari pemerintahan lainnya yaitu dengan frekuensi sebesar 38%.

Pertanyaan selanjutnya dari berbagai platform media sosial apa (FB, Instagram, Youtube, Twitter, Tiktok, aplikasi chat) mana yang paling sering digunakan untuk menyukai (like), berkomentar, dan membagikan (share) informasi/konten tentang ke-pemilu-an dan atau politik. dari diagram dibawah dapat dilihat bahwa aplikasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat untuk menyuka (like), berkomentar (comment) dan membagikan (share) informasi tentang ke-pemilu-an adalah aplikasi Facebook yaitu dengan frekuensi sebesar 21%.



Gambar 17. Platform media sosial yang sering digunakan

Selanjutnya dengan pertanyaan yaitu apakah Bapak/Ibu/Saudara percaya, ragu atau tidak percaya informasi tentang ke-pemilu-an dan atau politik yang didapatkan dari media sosial. dari gambar dibawah dapat dilihat bahwa terdapat 47% masyarakat masih ragu tentang informasi yang didapat dari media sosial dan terdapat 19% masyarakat yang percaya informasi tentang ke-pemilu-an yang didapat dari media sosial.

Selanjutnya dengan pertanyaan seberapa seringkah Bapak/Ibu/Saudara mengecek kembali kebenaran informasi tentang ke-pemilu-an dan atau politik yang didapatkan dari media sosial. dari diagram dibawah dapat dilihat bahwa terdapat 38% masyarakat yang jarang melakukan pengecekan kembali kebenaran informasi yang didapat dari media sosial, dan terdapat 22% masyarakat tidak pernah melakukan pengecekan kembali informasi yang didapat dari media sosial. kemudian selanjutnya terdapat 15% yang melakukan pengecekan kembali kebenaran informasi yang didapatkan melalui media sosial.



Gambar 18. Pengecekan kembali kebenaran informasi ke-pemilu-an

Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara Bapak/Ibu/Saudara mengecek kembali kebenaran informasi tentang ke-pemilu-an dan atau politik yang didapatkan dari media sosial. Dari tabel dibawah dapat dilihat bahwa ada beberapa cara masyarakat mengecek kembali informasi yang didapat dari media sosial yaitu ada dengan cara mengecek melalui google kadang-kadang sebesar 31,41%. mengecek melalui teman kadang-kadang sebesar 39,06%. mengecek melalui WA group kadang-kadang 57,81%. selanjutnya yang

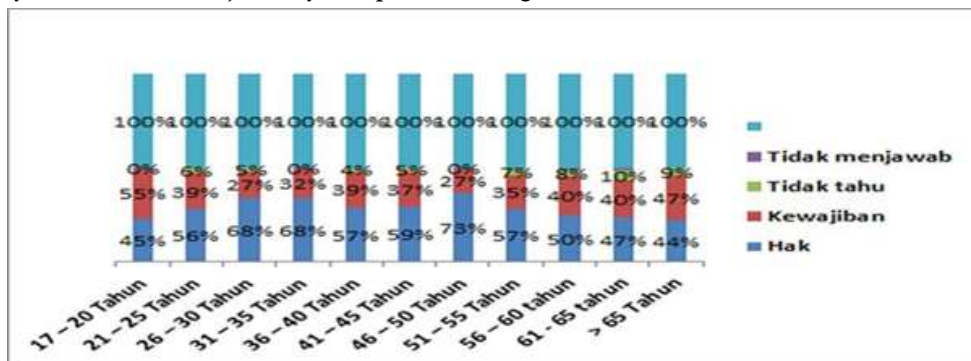
selalu mengecek melalui akun resmi berita online sebesar 9,22%. kemudian yang kadang-kadang mengecek melalui akun resmi pemerintahan sebesar 13,59%. yang mencetak melalui majalah kadang-kadang 15,78%.

Pertanyaan	Selalu	Kadang-kad	Tidak Perna	Tidak tahu	Tidak menja
Mengecek Kebenaran Info melalui GOOGLE	9,38%	31,41%	37,66%	5,16%	0,94%
Mengecek Kebenaran Info melalui TEMAN	12,34%	39,06%	28,13%	4,06%	0,63%
Mengecek Kebenaran Info melalui WA GRUP	3,75%	16,09%	57,81%	4,84%	1,56%
Mengecek Kebenaran Info melalui RESMI BERITA ON	9,22%	18,28%	48,75%	5,94%	1,88%
Mengecek Kebenaran Info melalui RESMI PEMERINT	5,31%	13,59%	58,28%	5,63%	1,41%
Mengecek Kebenaran Info melalui MAJALAH/ SURAT	2,97%	15,78%	58,28%	5,47%	1,25%

Gambar 19. Cara pengecekan kembali informasi

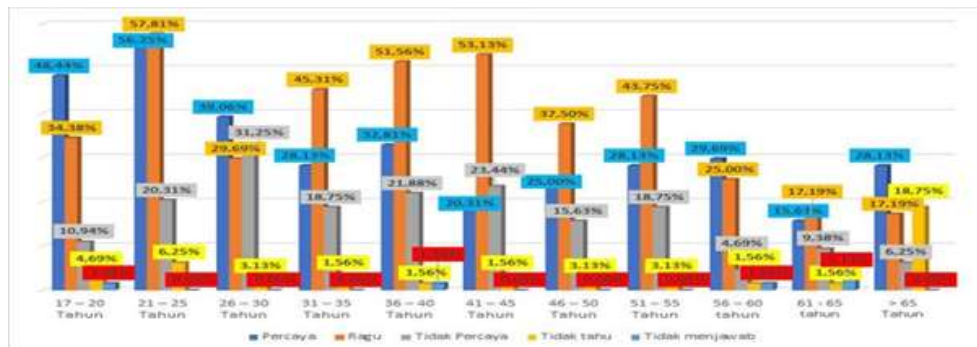
Pengetahuan tentang penyelenggaraan pemilu 2024

Rata-rata masyarakat yang menjawab pemilu tanggal 14 Februari yaitu pada rentang usia 31-35 tahun dengan jumlah persentase 54% sebaliknya terdapat 23% masyarakat salah menjawab yaitu pada rentang usia 36-40 tahun.



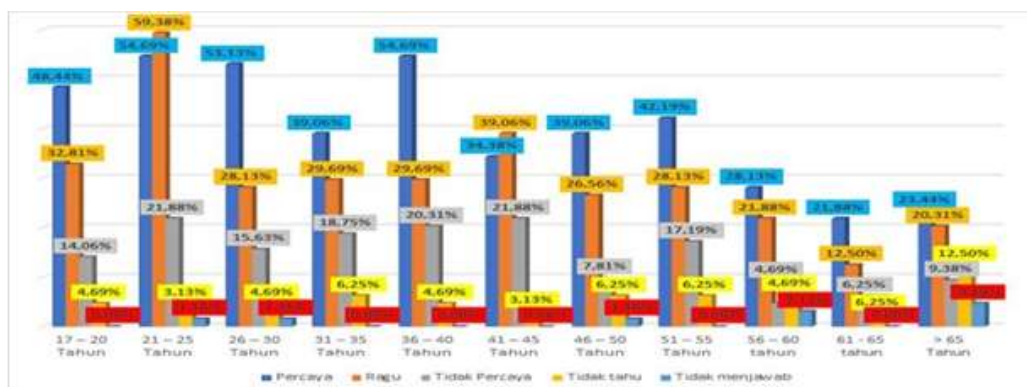
Gambar 20. Partisipasi pemilu adalah hak atau kewajiban

Dilanjuti dengan pertanyaan masyarakat menyimpulkan bahwa masyarakat lebih dominan percaya dan juga masih ragu bahwa pemilu akan menghasilkan kesejahteraan masyarakat pada rentang usia 17-20 tahun dengan persentase 48,44% sebaliknya terdapat pada usia 21-25 tahun dengan persentase 57,81%.



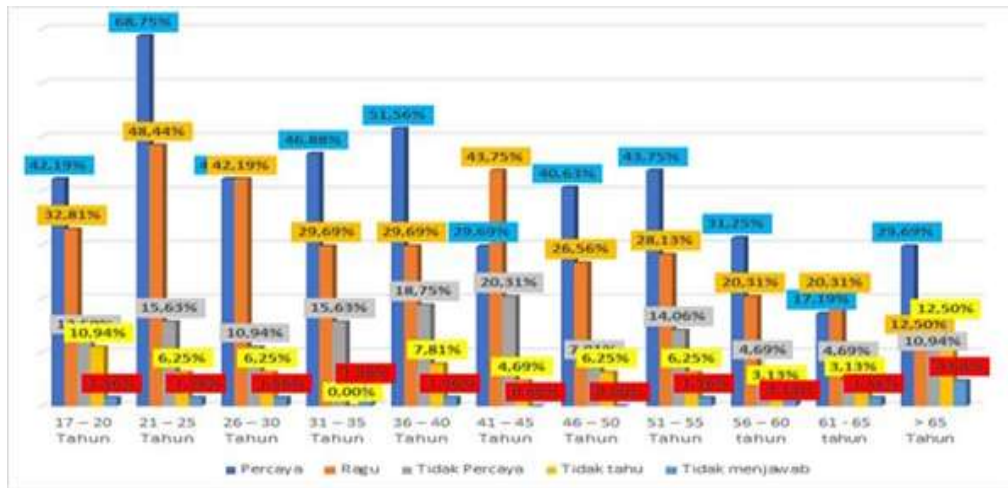
Gambar 21. Pemilu menghasilkan kesejahteraan masyarakat

Pada pertanyaan selanjutnya, yaitu masyarakat masih berimbang memilih percaya 54% pada rentang usia 36-40 tahun dan ragu 59% pada rentang usia 21-25 tahun bahwa pemilu akan menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab.



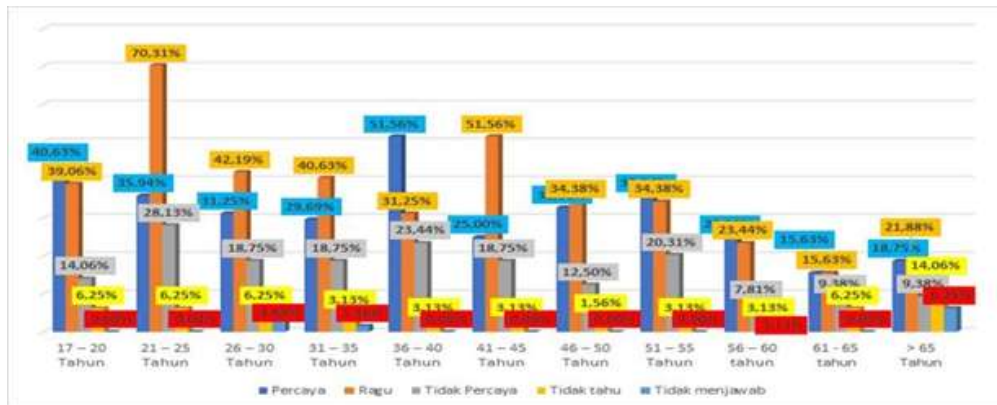
Gambar 22. Pemilu menghasilkan pergantian kepemimpinan secara damai

Dilanjuti dengan pertanyaan hampir 70% masyarakat yang berumur 21-25 tahun memilih percaya bahwa pemilu akan menghasilkan keberlanjutan pembangunan dengan persentase 68,75% dan sebaliknya masyarakat pada rentang usia 17-20 tahun dengan persentase 42,19%.



Gambar 23. Pemilu menghasilkan keberlanjutan pembangunan

Pada pertanyaan selanjutnya, yaitu 70% masyarakat yang berumur 21-25 tahun menjawab ragu bahwa pemilu akan menghasilkan pemimpin yang amanah dan melayani. Sebaliknya, rentang usia 17-20 tahun dengan persentase 40,63%.



Gambar 24. Pemilu menghasilkan kepemimpinan yang amanah dan melayani

Dilanjuti dengan pertanyaan hamper 60% semua masyarakat percaya bahwa pemilu akan dilaksanakan tanpa politik uang pada rentang usia 21-25 tahun dengan persentase 47,78% sebaliknya pada rentang usia 17-20 tahun dengan persentase 48,44%.

Partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka (Faulks,2021). Salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat yaitu ikut serta dalam pemilihan umum. Dikutip dari buku yang berjudul Pemetaan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula menyebutkan bahwa partisipasi politik dibagi menjadi 4 bagian salah satunya yaitu Partisipasi Penonton Politik yang dimana seseorang tersebut sudah pernah memberikan

suaranya dalam pemilihan umum paling sedikit satu kali (Bango et al, 2023). Semestinya, pemerintah memiliki peran penting untuk memastikan agar seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat dalam pemilihan harus memberikan suaranya dalam pemilihan umum baik itu pemilihan presiden, pemilihan umum legislatif atau pemilihan umum kepala daerah. Sebanyak lebih dari 90% dari usia 17-20, 21-25, 31-35, 36-40, 40-50, 51-55, 56-60 dan 61-65 menyebutkan bahwa akan berpartisipasi dalam pemilu. Sedangkan dari usia 26-30, 41-45, dan >65 hanya 80% keatas menyebutkan bahwa akan berpartisipasi dalam pemilu. Dapat disimpulkan sebanyak 80% masyarakat pariaman akan berpartisipasi dalam politik dengan mengikuti pemilihan umum.

Jika dilihat pertanyaan pada kuesioner terdapat pertanyaan apakah masyarakat percaya, ragu atau tidak percaya bahwa pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan tanpa politik uang, kampanye hitam, manipulasi perolehan suara, kecurangan di TPS, hoax, keberpihakan PNS, kecurangan dari penyelenggara. Pada pertanyaan pertama, yaitu pemilu tanpa politik uang, rata-rata masyarakat menjawab tidak percaya bahwa pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan tanpa politik uang dengan persentase 50%, rata-rata menjawab pada rentang usia 26-30 tahun, hal ini berkaitan dengan korupsi politik atau yang sering kita dengar dengan istilah politik uang. Dengan tujuan utama untuk meraih suara terbanyak dan memenangkan pemilu, praktek jual-beli suara yang melibatkan peserta pemilu (partai politik/ kandidat) dengan pemilih dikategorisasi sebagai salah satu bentuk suap terhadap pemilih atau electoral bribery (Husin et al., 2021). Jika dilihat pada pemberitaan terkait praktek jual-beli suara ini sudah banyak terjadi di negara kita, salah satu contoh yang pernah terjadi ialah pengakuan Caleg gagal DPR RI di Karawang yang jual-beli suara, ia mengaku bahwa "Saya tahu itu (beli suara) perbuatan salah. Tapi tetap dilakukan karena orang (caleg) lain begitu juga," (Awaluddin, 2019). Jika kejadian ini terus terjadi akan menjadi fenomena yang berbahaya dan akan menyebabkan hilangnya rasa kejujuran dan keadilan dalam pemilihan suara. Sehingga dengan demikian masyarakat banyak tidak percaya bahwa pemilu di Indonesia telah dilakukan tanpa politik uang. Dari sini nampak bahwa korupsi politik di pemilu Indonesia memiliki cakupan dan dimensi yang cukup luas dengan melibatkan relasi antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu (Husin et al., 2021).

Kesimpulan

Masyarakat Kota Pariaman memiliki latar belakang yang berbeda-beda baik berdasarkan agama, suku, dan pekerjaan. Perbedaan identitas masyarakat ini tidak menjadi alasan terhadap rendahnya tingkat literasi politik. Literasi politik pada saat ini

sangat diperlukan lebih lagi karena akan dilaksanakannya Pemilu 2024. Survei literasi politik jelang pemilu dilakukan di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 25-26 November 2023.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu 1. Sebagian besar masyarakat Kota Pariaman menyebutkan bahwa pelaksanaan pemilu merupakan hak yang dimiliki oleh warga negara Indonesia 2. Masyarakat Kota Pariaman tidak sepenuhnya percaya atau ragu bahwa pemilu dapat menghasilkan kesejahteraan masyarakat 3. Masyarakat Kota Pariaman tidak mempercayai bahwa pelaksanaan pemilu sudah dilaksanakan tanpa adanya malpraktik politik atau kecurangan lainnya 4. Masyarakat Kota Pariaman tidak begitu mengikuti pemberitaan kepemiluan atau politik sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Pariaman tidak begitu peduli dengan pemilu dan politik 5. Masyarakat Kota Pariaman lebih menyukai konten hiburan dibandingkan konten lainnya 6. Sebagian besar Masyarakat Kota Pariaman menggunakan aplikasi Facebook dalam mencari informasi 7. Hanya sedikit informasi politik dan pemilu yang didapatkan masyarakat kota pariaman dalam menggunakan media sosial 8. Masyarakat Kota Pariaman jarang melakukan pengecekan kembali mengenai kebenaran informasi tentang politik dan pemilu. Biasanya, cara untuk mengecek kembali kebenaran informasi ini dilakukan dengan obrolan bersama teman 9. Sebagian besar masyarakat Pariaman sudah mengetahui tanggal pelaksanaan pemilu 2024 10. Sebagian besar masyarakat pariaman sudah menentukan pilihan calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilih pada pemilu 2024.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Syakir Media Press.
- Awaluddin, L. (2019). Pengakuan Caleg Gagal DPR RI di Karawang yang Jual Beli Suara. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4591180/pengakuan-caleg-gagal-dpr-ri-di-karawang-yang-jual-beli-suara/>
- Badan Pusat Statistik Kota Pariaman. (2021). Jumlah Penduduk 2019-2021. <https://pariamankota.bps.go.id/indicator/12/29/1/jumlah-penduduk.html>
- Bango, T. F. W. et al. (2023). *Pemetaan Partisipasi Politik Bagi Pemilih Pemula*. Palembang: Unsri Press.
- Faulks, K. (2021). *Sosiologi Politik: Gerakan Sosial Baru*. Jakarta: Nusamedia.
- Heryanto, G. et al. (2019). *Literasi Politik*. Yogyakarta: Irchisod.

- Husin, L. H., et al. (2021). Malpraktek Pemilu dan Korupsi: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan Rekapitulasi pada Pemilu Indonesia 2019. *Integritas*, 7(1), 57–78. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.720>
- Karim, A. (2015). Memahami Tingkat Melek Politik Warga di Kabupaten Sleman. *JPP FISIPOL UGM dan KPU Kabupaten Sleman*
- Putri, N. E. (2017). Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(1).
- Setiawan, A. A. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV Jejak.
- Kusnandar. V. B (2022). Era Bonus Demografi, 69% Penduduk Indonesia Masuk Kategori Usia Produktif pada Juni 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/30/era-bonus-demografi-69-penduduk-indonesia-masuk-kategori-usia-produktif-pada-juni-2022>